

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNG MAS

Septa Soraida

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

septasoraida@feb.upr.ac.id

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gunung Mas. Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan dan rasio kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2022. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal kabupaten Gunung mas berada berada dikategori rendah, rasio ketergantungan berada dikategori sangat tinggi dan rasio kemandirian sangat rendah.

**Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, ketegantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan daerah**

**Abstrak.** *This study aims to determine the financial performance of the Gunung Mas district government. The performance indicators used in this study are fiscal decentralization, dependency ratios and regional financial independence ratios. The data used in this research is secondary data obtained from the Regional Revenue and Expenditure Budget of the Gunung Mas district government for 2019-2022. The analytical tool used in this study is descriptive analysis using the ratio of fiscal decentralization, the ratio of regional financial dependency and the ratio of regional financial independence. The results of the analysis show that the degree of fiscal decentralization of Gunung Mas district is in the low category, the dependency ratio is in the very high category and the independence ratio is very low.*

**Keywords:** *Fiscal decentralization, regional financial dependence, regional financial independence, regional financial performance*

### LATAR BELAKANG

Otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari puluhan tahun yang lalu. Dengan adanya otonomi pemerintah daerah berupaya mengurus sendiri urusannya pemerintahan yang ada didaerah masing-masing termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerah masing-masing sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih maksimal. Penerapan desentralisasi bukan berarti pemerintah pusat lepas campur tangan atas urusan pemerintah daerah akantetapi lebih kepada memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah agar lebih maksimal dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Desentralisasi merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah selain itu bentuk dukungan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah mendukung dalam hal keuangan yaitu dana perimbangan. Selain mendapatkan dana perimbangan pemerintah daerah juga

di tuntut untuk berupaya semaksimal mungkin agar dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah tersebut termasuk dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya Pendapatan Asli Daerah tersebut diharapkan agar meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi sehingga daerah lebih mandiri dalam hal keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap pemerintah daerah belum tentu sama hal ini disebabkan karena potensi setiap daerah juga berbeda sehingga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Suatu daerah dapat dikatakan mampu apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber penerimaan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, keuangan daerah berasal dari tiga sumber yakni diperoleh dari, (1). Pendapatan asli daerah, (2). Dana perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## KAJIAN TEORITIS

### Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-undang no 32 tahun 2004 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah agar lebih leluasa dalam mengatur pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bahkan dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat dalam membangun daerah.

Kemandirian tidak hanya dalam hal melaksanakan sistem pemerintahan tetapi juga dalam hal keuangan. Menurut Halim (2011) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Daerah yang mandiri biasanya merupakan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang lebih besar persentasenya jika dibandingkan dengan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat.

### Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, visi, misi suatu organisasi yang dituangkan dalam skema perencanaan strategi suatu organisasi (Bastian, 2001). Pengukuran kinerja harus dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor public. Hal ini disebabkan karena pengukuran kinerja dapat digunakan oleh organisasi sebagai dasar dalam memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). selain itu pengukuran kinerja juga bisa digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang melaksanakan otonomi daerah akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan sumber daya yang digunakan. Terutama sumber daya keuangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang kemudian dalam realisasinya akan digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa ada tiga tujuan terkait pengukuran kinerja sektor public yaitu : pertama, untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan

dan yang terakhir yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan pada perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). Rumus yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi dan sebaliknya semakin rendah pendapatan asli daerah maka semakin rendah pula kemampuan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi.

### **Analisis Rasio Ketergantungan Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer/dana perimbangan yang diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Menurut Mahmudi, (2010) Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan tranfer—danaPerimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

### **Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan daerah yang berasal dari pihak lain (pihak ekstern/pusat) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai untuk mengukur kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan yang diterima oleh daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran kabupaten Gunung Mas dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gunung Mas 2019-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Penerimaan Daerah (TPD)	Rasio Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2019	76.218.412.656,68	1.045.551.052.072,04	7,28	Sangat Kurang
2020	66.064.355.509,29	990.174.345.400,00	6,67	Sangat Kurang
2021	85.105.385.509,84	1.078.818.220.819,48	7,88	Sangat Kurang
2022	81.435.080.000,00	1.021.691.813.000,00	7,97	Sangat Kurang

Sumber : Data di olah

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi pada tahun 2019 rasio desentralisasi fiskal sebesar 7,28 kemudian pada tahun 2020 rasio desentralisasi fiskal mengalami penurunan sebesar 6,67 dan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,88 dan 7,97. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa rasio desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten Gunung Mas masih berada dalam kondisi Sangat Kurang artinya bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah Gunung Mas masih perlu dukungan yang sangat besar dari pemerintah pusat hal ini tercermin dalam ketidakmampuan pemerintah daerah Gunung Mas dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan harus dibantu oleh pemerintah pusat.

#### **Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan**

Tabel 2 Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Gunung Mas 2019-2022

Tahun	Dana Transfer	Total Penerimaan Daerah (TPD)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Keterangan
2019	834.759.269.415,36	1.045.551.052.072,04	79,83	Sangat Tinggi
2020	794.399.785.644,77	990.174.345.400,00	80,22	Sangat Tinggi
2021	964.971.469.665,64	1.078.818.220.819,48	89,44	Sangat Tinggi
2022	913.899.771.000,00	1.021.691.813.000,00	89,44	Sangat Tinggi

Sumber : Data di olah

Berdasarkan perhitungan yang ada di dalam tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten Gunung Mas sebesar 78,83 kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 80,22 dan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan Kembali yaitu sebesar 89,44. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Gunung Mas masih memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat terutama dari Dana Perimbangan.

#### **Analisis Rasio Kemandirian**

Tabel 3 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Gunung Mas 2019-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Keterangan
2019	76.218.412.656,68	794.333.515.276,00	9,59	Rendah Sekali

2020	66.064.355.509,29	729.018.572.192,00	9,06	Rendah Sekali
2021	85.105.385.509,84	786.960.821.762,00	10,81	Rendah Sekali
2022	81.435.080.000,00	789.942.816.000,00	10,30	Rendah Sekali

Sumber : Data di olah

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio kemandirian yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 9,59, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,06 akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan Kembali yaitu sebesar 10,81 dan 10,30. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Gunung Mas memiliki tingkat kemandirian yang rendah artinya dalam menjalankan pemerintahan pemerintah kabupaten Gunung Mas masih membutuhkan bantuan yang signifikan dari pemerintah pusat khususnya dalam hal pembiayaan yang akan digunakan dalam mmeberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gunung Mas ditinjau dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal tahun 2019-2022 berada dalam kriteria yang sangat kurang. Sedangkan rasio ketergantungan pemerintah kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019-2022 berada dalam rentang 79,83 sampai 89,44 hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Gunung Mas memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat terutama dana perimbangan. Rasio terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten Gunung Mas masih tergolong sangat rendah hal ini disebabkan karena dana perimbangan masih mendominasi jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah Gunung Mas diharapkan dapat menggali lagi sumber daya yang ada di daerahnya sehingga sumber daya tersebut dapat memberikan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah selain itu perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar dapat memberikan masukan terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Halim, A., et al. (2011). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI
- Susilawati, D., Wardana, L., K., & Rahmawati, I., F. (2018). Kinerja Keuangan Dengan Financial Ratio Analisis: Studi Kasus Bkad Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 91- 99
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020  
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021  
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

